

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan kerja sama Korea Selatan dengan Tiongkok telah terjalin pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 2003, hubungan yang terjalin telah diartikan sebagai kerja sama yang komprehensif. Pada tahun 2014, hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok diartikan sebagai hubungan kerjasama yang strategis. Hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok semakin menguat dengan dibentuknya *China-South Korea Free Trade Agreement (CKFTA)* pada tahun 2015. Namun, hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok mulai memburuk pada tahun 2016.

Hal ini terlihat ketika Korea Selatan memutuskan untuk membangun (*Terminal High Altitude Area Defense*) melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. THAAD akan dibangun pada tahun 2017 setelah pengumuman keputusan pada tahun 2016. Kesepakatan tersebut dibuat sebagai upaya untuk mengantisipasi percobaan senjata nuklir oleh Korea Utara di dekat perbatasan Semenanjung Korea yang membatasi Korea Utara dan Korea Selatan.¹ Namun, Tiongkok merasa terancam dengan keberadaan radar yang dihasilkan dari sistem THAAD yang bisa melacak *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* milik Tiongkok.

Permasalahan THAAD semakin memanas pada masa pemerintahan Moon Jae In dengan terjadinya beberapa pemboikotan baik dalam bidang perekonomian, pariwisata dan industri kebudayaan. Namun, sebenarnya THAAD merupakan

¹ Ethan Meick dan Nargiza Salidjanova, *China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment dan Its Implications* (U.S- China Economic dan Security Review Commission, 2017). https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Report_China%27s%20Response%20to%20THAAD%20Deployment%20dan%20its%20Implications.pdf.

permasalahan yang diwariskan ke Moon Jae In dari pemerintahan Park Geun Hye yang digulingkan. Akan tetapi, Hwang Gyo Han sebagai Presiden sementara yang memutuskan kesepakatan THAAD secara mendadak sebelum pemilihan presiden yang nantinya dimenangkan oleh Moon Jae In. Situasi pemerintahan Korea Selatan pada 2016 berada pada situasi yang tidak stabil dengan berbagai kontroversi yang dilakukan oleh Park Geun Hye, bahkan rencana mengenai keberadaan THAAD mengalami berbagai pertentangan dalam negeri di Korea Selatan.

Pada Februari 2016, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi bertemu dengan Yun Byung Se yang merupakan Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan dalam pertemuan keempat pada International Syria Support Group (ISSG) di Munich. Pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk meminta pembatalan rencana pembangunan THAAD di Korea Selatan.² Selain itu, Tiongkok juga melakukan sanksi ekonomi melalui pembatasan masuknya impor terhadap beberapa produk-produk elektronik asal Korea Selatan. Produk-produk dari Samsung Electronics dan LG Electronics menerima pembatasan dikarenakan tidak memenuhi standar oleh China's General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ).³

Sejak Agustus 2016, pemboikotan oleh TV Tiongkok mulai dilakukan dengan mengaburkan atau memotong tayangan yang menampilkan selebritas asal

² Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, "Wang Yi Meets with Foreign Minister Yun Byung-Se of the ROK," *Ministry of Foreign Affairs the Republic People's of China*, diakses pada November 5 2022. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2767_663538/2769_663542/201503/t20150324_522466.html.

³ Hyong Ki Park, "China Ups THAAD Retaliation against Korean Products," *Koreatimes*, diakses pada 3 November 2022. https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/11/602_222465.html.

Korea Selatan.⁴ Kegiatan yang berkaitan dengan dunia hiburan Korea Selatan seperti *fans meeting* dan konser juga terpaksa dibatalkan sebagai dampak dari THAAD. Memburuknya hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok membawa dampak buruk bagi sektor perdagangan dan juga sektor pariwisata di Korea Selatan. Dengan keberadaan konflik THAAD, pada tahun 2017 telah terjadi penurunan jumlah turis asal Tiongkok sebanyak 66 persen dengan data sejumlah 254 ribu turis Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan *seven guidelines* untuk mengurangi sebanyak 20 persen masyarakat Tiongkok untuk berkunjung ke Korea Selatan.⁵ Selain itu, pemboikotan turut terjadi pada Lotte karena telah terlibat dengan memberikan lahan di Seongju untuk dijadikan tempat pemasangan THAAD. Tepat setelah kebijakan pemberian lahan disepakati oleh Lotte dan Pemerintah Korea Selatan, Tiongkok memberikan denda kepada beberapa cabang Lotte di Beijing sebanyak \$6,500 untuk *false advertisement*.⁶

Tiongkok memiliki harapan yang tinggi setelah Moon Jae In menjadi Presiden Korea Selatan. Hal ini dikarenakan selama masa kampanye dan bahkan setelah dilantik, Moon Jae In menyatakan tidak akan melanjutkan THAAD. Selain itu, Moon Jae In menegaskan akan lebih berfokus kepada strategi berdasarkan kesemakmuran bersama dan hal ini sesuai dengan kebijakan Tiongkok terhadap Semenanjung Korea. Akibatnya, South Korea dan Tiongkok kembali

⁴ The Korea Times Reporter, "Actors' Fan Meeting in China Canceled amid Political Rumors," Koreatimes, terakhir diubah pada 4 Agustus 2016, diakses pada 23 Februari 2023. https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2022/07/688_211112.html?RD.

⁵ Young Joon Ye dan Hwa Seon Sung, "Reduce 20% of Youkers Bound for Korea, Local Shopping Only Once a Day," The JoongAng, terakhir diubah pada 25 Oktober 2016, diakses pada 23 Februari 2023. <https://www.joongang.co.kr/article/20773807#home>.

⁶ Jonathan Kaiman dan Matt Stiles, "China, Upset over a Planned Missile-Defense System, Is Taking Aim at South Korea's Pop Stars dan TV Shows," Los Angeles Times, terakhir diubah 1 Maret 2017, diakses pada 23 Februari 2023. <https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-koreathaad-20170301-story.html>.

melaksanakan dialog strategi dengan perwakilan masing-masing untuk membahas urusan luar negeri dan pertemuan ini dilaksanakan di Beijing pada Juni 2017.

Akan tetapi, Presiden Moon Jae In menandatangani perjanjian pada U.S-South Korea *Summit* ketika sedang berkunjung ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan trilateral untuk urusan keamanan.⁷ Hal ini ditanggapi Tiongkok sebagai bentuk penyerangan terhadap Tiongkok dan transformasi hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ke dalam aliansi regional. Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok semakin memanas ketika Moon Jae In tetap melanjutkan pengembangan THAAD pada Agustus 2017. Kemudian untuk mengatasi situasi yang semakin memanas, Moon Jae In mengirim delegasi untuk berkunjung ke Tiongkok pada 31 Oktober 2017.⁸

Dalam kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan dua arah yang akhirnya disebut dengan *Three No's Policy*. Hal ini diputuskan berdasarkan isu THAAD serta sebagai bentuk usaha untuk menjalin kembali hubungan yang merenggang antara Korea Selatan dengan Tiongkok. Dalam *Three No's Policy* disebutkan tiga hal yakni, 1) bahwa tidak ada penambahan pengembangan THAAD, 2) tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat, 3) tidak adanya hubungan trilateral dalam aliansi militer dengan Amerika Serikat dan Jepang. Setelah pengumuman *Three No's Policy* tidak banyak mengubah hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok.

⁷ Scoot A Snyder, "Launching a New Era in U.S.-South Korea Relations," *Council on Foreign Relations* (Asia Unbound, Juli 12, 2017), terakhir diubah Juli 12, 2017. diakses pada 12 Juni 2023. <https://www.cfr.org/blog/launch-trump-moon-era-us-korea-relations>.

⁸ Yonhap News, "Results of Consultations between the Two Countries on Improving Korea-China Relations," *Yonhap News*, terakhir diubah Oktober 31, 2017. diakses pada 12 Juni 2023. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20171031066800014?input=1179m>.

Hal ini bisa dilihat dari perlakuan yang diterima oleh Moon Jae In ketika melakukan kunjungan ke Beijing pada Desember 2017. Pada kunjungan tersebut Tiongkok juga menolak untuk membahas mengenai penghapusan sanksi ekonomi yang disebabkan oleh THAAD. Pelaksanaan South Korea-China *Summit* kembali batal dilakukan pada pertemuan G20 yang dilaksanakan di Argentina pada 2018. Berbanding terbalik dengan semakin memburuknya hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok, Hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat erat dengan pembahasan mengenai Taiwan yang cukup konservatif untuk dilakukan selama bagi pemerintah Korea Selatan.

Kemudian, Tiongkok tidak menyambut baik ketika terpilihnya Yoon Suk Yeol sebagai presiden Korea Selatan. Hal ini disebabkan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan dari pemerintah Yoon Suk Yeol sangat jelas lebih merujuk kepada hubungan yang berpihak kepada Amerika Serikat. Kebijakan yang dilakukan oleh Yoon Suk Yeol terhadap Tiongkok membawa hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok ke hubungan yang lebih rendah karena berfokus kepada hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Hal ini juga bertentangan dengan kesepakatan *Three No's Policy* yang disepakati pada pemerintahan Moon Jae In.

Selain itu, Yoon Suk Yeol selama masa kampanye juga menyampaikan tertarik untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Jepang dan melakukan hubungan trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan pada Desember 2021, Yoon Suk Yeol menyampaikan pernyataan yang mengarah kepada *anti-china* dan hal ini disampaikan langsung dihadapan masyarakat Korea Selatan pada American Chamber of Commerce in Korea (AMCHAM Korea).

Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy* yang tepatnya berada pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol sangat jauh bertentangan dari isi *Three No's Policy* itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy* tidak sebaik sebelum terjadinya THAAD. Sehingga penting untuk melihat bentuk hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy* hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok mengalami beberapa hambatan seperti munculnya konflik pembangunan THAAD di Korea Selatan yang mendapat penolakan dari Tiongkok yang merasa dirugikan dalam segi keamanan. Selain itu, sektor industri budaya, pariwisata, dan perdagangan juga terdampak oleh THAAD. Dalam mengatasi hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok yang semakin memburuk, Moon Jae In mengutus delegasi ke Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut diputuskan kesepakatan dua arah yang akhirnya disebut sebagai *Three No's Policy*. *Three No's Policy* berisikan bahwa Korea Selatan tidak akan melanjutkan pengembangan THAAD, berpartisipasi dalam jaringan misil pertahanan milik Amerika Serikat serta melakukan hubungan trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang. Namun, hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok setelah pengumuman *Three No's Policy* tidak kunjung membaik. Bahkan semakin memburuk pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol yang mana Korea Selatan menjadi lebih berpihak kepada hubungan bilateral Korea Selatan dan Amerika Serikat. Selain itu, Yoon Suk Yeol juga memiliki harapan untuk membangun hubungan trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Peneliti menarik pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dan menghasilkan sebuah pertanyaan “Bagaimana Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy*?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy* yang disebabkan oleh THAAD, sehingga membuat Korea Selatan mengalami pemboikotan di sektor industri budaya, pariwisata dan perdagangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa Hubungan Internasional terkait hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Instansi Pemerintahan suatu negara seperti Kementerian Perdagangan dan Pariwisata. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih pada rekonsiliasi hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca normalisasi THAAD di Korea Selatan melalui *Three No's Policy*.

1.6 Studi Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa kajian maupun literatur untuk memperkuat dan mengembangkan hasil penelitian dan akan menjadi bahan referensi dalam melakukan analisis permasalahan yang sedang dikaji.

Pertama, peneliti memilih "*South Korea and Chinese Conflict Over THAAD: How It Started and The Way It Ended*" oleh Anggraining Tias.⁹ Konflik antara Korea Selatan dengan Tiongkok dimulai sejak Korea Selatan ingin menempatkan THAAD di Seongju untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan di perbatasan. Namun, Tiongkok merasa terancam dengan keberadaan THAAD sehingga menimbulkan penolakan keras oleh Tiongkok dengan pemboikotan ekspor produk seperti produk kecantikan, ekspor konten kebudayaan atau konten *korean wave* seperti *K-Drama*, *K-Music* dan lainnya. Kemudian, pemboikotan juga dirasakan oleh sektor pariwisata dengan pelarangan turis Tiongkok untuk berkunjung ke Korea Selatan.

Tulisan pertama ini sangat menggambarkan data-data yang peneliti dapatkan pada latar belakang penelitian bahwa terjadi pemboikotan oleh Tiongkok. Tulisan ini membantu peneliti untuk membuktikan data-data yang ditemukan. Korea Selatan telah mengalami pemboikotan yang merugikan sehingga diperlukan solusi untuk memperbaiki hubungan diantara Korea Selatan dengan Tiongkok. Solusi terbaiknya adalah melalui *Three No's Policy* yang juga menjadi fokus penelitian. Peneliti melihat bahwa konflik yang disebabkan oleh THAAD sangat berpengaruh terhadap hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok. Bahkan hingga saat ini Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok tidak sama seperti sebelum konflik THAAD.

Kedua, peneliti memilih tulisan oleh Wei Na Kong yang berjudul "*Economic Effect and Resolution Idea of the THAAD Political Conflict on South*

⁹ Anggraining Tias, "South Korea dan Chinese Conflict over THAAD: How It Started dan the Way It Ended," *Review of International Relations* 2, no. 2 (Januari 31, 2021).

Korea's Exports to China".¹⁰ Pada tulisan ini menjelaskan bahwa dengan adanya FTA sedikit mengurangi dampak bagi perekonomian Korea Selatan dalam ekspor ke Tiongkok dalam hal komoditi tradisional. Namun, konflik THAAD memberikan dampak yang signifikan pada perdagangan jasa seperti arus pariwisata. Namun, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dampak dari THAAD bisa saja memudar seiring dengan upaya kedua negara ini yakni Korea Selatan dengan Tiongkok untuk memulihkan hubungan bilateral sehingga menghasilkan kerjasama perdagangan yang lebih baik di masa depan.

Penulis memilih tulisan kedua untuk melihat efek yang disebabkan oleh pemboikotan produk-produk ekspor asal Korea Selatan oleh Tiongkok. Terlihat jelas bahwa sanksi ekonomi telah dilakukan oleh Tiongkok sebagai dampak dari THAAD. Hal ini juga tergambar dengan jelas pada data yang peneliti dapatkan sehingga tulisan ini bisa membantu peneliti untuk menggambarkan seperti apa sanksi ekonomi yang telah dilakukan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, peneliti melihat tulisan ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk memvalidasi data dan mencocokkan data yang telah diperoleh pada latar belakang.

Ketiga, Peneliti menggunakan tulisan yang berjudul "*The Impact of a Terminal High Altitude Area Defense Incident on Tourism Risk Perception and Attitude Change of Chinese Tourists Traveling to South Korea*" oleh Hao Zhang, Taeyoung Cho, dan Huang Jiong Wang.¹¹ Tulisan ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisisioner *survey* sebanyak 1000 penduduk Tiongkok dari 34 Provinsi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ada hubungan erat

¹⁰ Wei-Na Kong, "Economic Effect dan Resolution Idea of the THAAD Political Conflict on South Korea's Exports to China," *The Chinese Economy* 55, no. 2 (Juni 15, 2021): 88–110.

¹¹ Hao Zhang, Taeyoung Cho, dan Huanjiong Wang, "The Impact of a Terminal High Altitude Area Defense Incident on Tourism Risk Perception dan Attitude Change of Chinese Tourists Traveling to South Korea," *Sustainability* 12, no. 1 (Desember 18, 2019): 7.

antara persepsi risiko yang kuat dari destinasi akan menghancurkan citra pariwisata, citra budaya, dan citra stabil, dan meningkatkan citra destinasi yang tidak stabil. Persepsi risiko pariwisata berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan sikap pariwisata yang mana warga negara Tiongkok yang berencana bepergian ke Korea Selatan cenderung mengubah tujuan mereka. Persepsi risiko wisata berpengaruh negatif secara signifikan terhadap minat perilaku wisatawan dimana akan mengurangi niat warga Tiongkok untuk bepergian ke Korea Selatan bahkan membuat mereka membatalkan rencana perjalanan mereka.

Tulisan ini digunakan untuk melihat dampak dari pelarangan untuk berwisata ke Korea Selatan oleh pihak yang berwenang sehingga mengakibatkan sejumlah agensi wisata Tiongkok menghambat sejumlah *tour* wisata ke Korea Selatan. Kemudian, peneliti ingin melihat dampak yang disebabkan oleh THAAD terhadap persepsi risiko masyarakat Tiongkok untuk berkunjung ke Korea Selatan. Kemudian, peneliti ingin memastikan permasalahan yang terjadi dapat menyebabkan perubahan sikap masyarakat Tiongkok yang awalnya menjadi negara dengan jumlah turis terbanyak ke Korea Selatan akibat THAAD.

Keempat, peneliti menggunakan tulisan yang berjudul "*Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea's Soft Power Success and China's Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment*" oleh Hannah Jun.¹² Tulisan menjelaskan bahwa *Hallyu* sangat sukses berkembang di Kawasan Asia yang mana Tiongkok menjadi negara yang paling terpengaruh oleh *hallyu* atau *korean wave*. Hal ini bisa dibuktikan dengan

¹² Hannah Heekyung Jun, "Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea's Soft Power Success dan China's Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment," *Asian International Studies Review* 18, no. 1 (Juni 2017): 153–169.

besarnya jumlah wisatawan asal Tiongkok berkunjung ke Korea Selatan dan konsumsi produk Korea Selatan oleh masyarakat Tiongkok. Namun, *hallyu* yang merupakan *soft power* bagi Korea Selatan mulai berbenturan dengan *hard power* Tiongkok dengan keberadaan THAAD di Korea Selatan.

Peneliti menggunakan tulisan ini untuk melihat Tiongkok sebagai negara yang paling besar perkembangan *hallyu* menanggapi THAAD. Apalagi dengan berkembang pesatnya *hallyu* sebagai sebuah *soft power* bagi Korea Selatan berhadapan dengan penolakan yang mulai dilakukan pasca THAAD. Peneliti ingin melihat peran *hallyu* dalam rekonsiliasi hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three NO's Policy*. Peneliti melihat bahwa terdapat hubungan yang timbal balik akibat kebutuhan akan *hallyu* di Tiongkok. Oleh karena itu, *hallyu* bisa menjadi salah satu alat normalisasi hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three NO's Policy*.

Kelima, penulis menggunakan tulisan oleh Lu Chen yang berjudul "*The Emergence of the anti-Hallyu Movement in China*".¹³ Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Tiongkok, terlepas dari konflik politik yang terjadi tampaknya tidak menghambat perkembangan hubungan kedua negara ini. Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Korea Selatan diketahui semakin banyak mengimpor produk Korea Selatan termasuk seperti musik dan drama yang akhirnya dikenal sebagai *hallyu* atau *korean wave*. Namun seiring dengan berkembangnya arus budaya transnasional, Gerakan *anti-hallyu* atau *anti-Korea* telah muncul pada komunitas masyarakat di Tiongkok.

¹³ Lu Chen, "The Emergence of the Anti-Hallyu Movement in China," *Media, Culture & Society* 39, no. 3 (Juli 9, 2016): 374–390.

Perkembangan *anti-hallyu* ini menjadi salah satu faktor penghambat hubungan Korea Selatan ke Tiongkok. Dengan sentiment yang menolak pengaruh *korean wave* atau *hallyu*, penulis menganalisa bahwa terjadi dampak yang signifikan terhadap ekspor konten kebudayaan *hallyu* terhadap industri klaster kebudayaan lain seperti pariwisata dan perekonomian Korea Selatan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh ekspor kebudayaan Korea Selatan melalui *korean wave* sangat besar pengaruhnya bagi hubungan Korea Selatan ke Tiongkok sebelum adanya konflik THAAD. Oleh karena itu, penulis memilih tulisan keempat ini untuk melihat dampak dari sentimen *anti-hallyu* terhadap hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok.

1.7 Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti akan membutuhkan teori atau konsep untuk menganalisis permasalahan yang akan mencapai hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian, peneliti memilih menggunakan Teori Interdependensi oleh Robert. O Keohane dan Joseph S. Nye.¹⁴

1.7.1 Teori Interdependensi

Interdependensi secara umum merupakan sebuah keadaan dimana hal yang dilakukan dapat ditentukan serta dipengaruhi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh aktor eksternal. Namun dalam hubungan internasional, Interdependensi dapat diartikan sebagai sebuah konsep dimana negara bukanlah sebagai aktor independen sehingga negara akan saling bergantung. Ketergantungan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak semua bisa terpenuhi sehingga memerlukan negara lain untuk memenuhinya. Montesquieu mengklaim bahwa

¹⁴ R Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012).

efek alami dari perdagangan adalah untuk menuju perdamaian. Sehingga dua negara yang berdagang bersama menjadi saling bergantung yang mana jika yang satu tertarik untuk membeli maka yang lain tertarik untuk menjual dan semua serikat pekerja didasarkan pada kebutuhan bersama.¹⁵

Interdependensi yang dilakukan oleh aktor tidak hanya berdasarkan kepada hubungan yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, negara berkembang yang memiliki hubungan interdependensi tidak selamanya berdasarkan kepada kebutuhan terhadap negara lain. Hubungan interdependensi bisa juga dilihat secara subyektif untuk menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan.¹⁶ Interdependensi sudah terjadi bahkan sejak Perang Dunia II, hal ini dilihat dari terjadinya kegiatan jual beli barang dalam skala internasional yang terjadi secara lintas batas sehingga mempengaruhi bentuk hubungan yang terjalin hingga melintasi batas negara.¹⁷

Interdependensi yang digunakan disini merujuk kepada tulisan Keohane dan Nye yang berjudul *power and interdependence*. Konsep interdependensi seperti merumuskan sebuah konsep baru terkait pengaruh tawar menawar yang dilakukan antar negara yang menggunakan *asymmetrical interdependence* sebagai sebuah variabel untuk mempengaruhi perilaku suatu negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bawah *power and interdependence* merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan Keohane dan Nye dalam menjelaskan terdapat sebuah tawar menawar kekuasaan antar negara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi

¹⁵ Albert. O Hirschman, *National Power dan the Structure of Foreign Trade* (University of California Press: Reprint, Berkeley, 1980).

¹⁶ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 8.

¹⁷ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 8.

negara lain. Sehingga menurut Keohane dan Nye, power menjadi faktor yang penting yang menentukan dan mempengaruhi ketergantungan yang terjalin dalam sebuah hubungan .

Power dapat digunakan sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain agar melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan negara yang memiliki kekuasaan lebih besar. Bentuk interdependensi yang terjalin akan dipengaruhi oleh power sesuai dengan kemajuan teknologi serta integrasi ekonomi secara global.¹⁸ Namun, Keohane dan Nye beranggapan bahwa power bukan satu-satunya yang dapat mempengaruhi interdependensi. Situasi *bargaining position* atau tawar menawar dan *power resource* dianggap menjadi elemen penting untuk mendukung power dalam interdependensi.¹⁹

Peran *power* dan *bargaining position* tidak berada pada posisi yang seimbang dalam menjalin hubungan kerjasama sehingga bisa memberikan keuntungan antara kedua negara untuk bisa mengimplementasikan *power* dan *bargaining position* melalui aktor-aktor yang nantinya ikut serta dalam hubungan kerjasama. Pada akhirnya negara situasi ini akan menyebabkan adanya ketergantungan dan upaya untuk saling mempengaruhi melalui sebuah kebijakan seperti kebijakan ekonomi yang digunakan untuk memperoleh kepentingan masing-masing. Kemudian, Keohane dan Nye melihat *terdapat power resource* yang lebih tinggi dalam interdependensi sebagai bentuk untuk menghasilkan keuntungan bersama.²⁰

¹⁸ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 7.

¹⁹ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 9.

²⁰ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 10.

Penggunaan *power resource* oleh negara maju maupun negara berkembang dalam memperoleh keuntungan bersama menggunakan perekonomian maupun militer akan menimbulkan kondisi atau situasi yang disebut sebagai hubungan *asymmetrical interdependence*. Oleh karena itu, *asymmetrical interdependence* merupakan sebuah hubungan ketika tingkat kekuasaan yang dimiliki salah satu negara yang menjalin kerjasama tidak setara dalam ekonomi, budaya, dan militer. Oleh karena itu, *power resource* yang lebih tinggi digunakan dalam situasi *asymmetrical interdependence* oleh negara maju untuk mempengaruhi negara lain. Situasi interdependensi yang tidak simetris akan menciptakan *bargaining position* dalam menjalankan hubungan interdependensi. Kemudian situasi *asymmetrical interdependence* dilihat melalui *sensitivity* dan *vulnerability* yang dimiliki masing-masing negara.²¹

1. *Sensitivity*

Elemen pertama untuk memahami konsep *power and interdependence* oleh Robert O. Keohane dan Joseph Nye adalah *sensitivity*. *Sensitivity* merupakan reaksi suatu negara terhadap sebuah kerangka kebijakan ketika telah terjadi sebuah perubahan dalam pembentukan kerangka kebijakan negara dan bisa berdampak cukup signifikan terhadap negara lain. Perubahan yang dimaksud tidak hanya dilihat berdasarkan tingkat volume perdagangan internasional namun juga bisa dilihat berdasarkan transaksi yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, negara yang tidak melakukan perubahan terhadap kerangka kebijakan mengikuti perubahan yang terjadi akan memiliki hambatan karena pola perdagangan domestik telah terikat dengan perdagangan internasional

²¹ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 10.

melalui kebijakan tertentu. Kemudian untuk menjelaskan sensitivity dalam melihat hubungan yang terjalin berdasarkan *financial*, *trade*, *monetary* dan *political action* serta *social demonstration*.

a. *Trade*

Dalam komponen perdagangan, *sensitivity* dapat dilihat melalui kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional, dan total perdagangan internasional berdasarkan ekspor dan impor yang lebih dikenal dengan persentase GDP atau GNP.²² Masalah utama untuk melihat kepekaan dalam bidang perdagangan adalah kepentingan negara untuk dapat menghasilkan devisa negara atau pemasukan negara untuk perputaran perdagangan yang terikat dengan barang impor berupa energi seperti minyak ataupun barang pangan. Hal ini bisa berdampak kepada nilai mata uang atau *monetary* dan aktivitas investasi seperti nilai saham maupun penanaman modal dari investor asing yang dapat menyebabkan kerugian dan merugikan ekspor negara. Kepekaan pada sektor perdagangan bisa diukur melalui jumlah dari total keseluruhan perdagangan berdasarkan ekspor dan impor yang akan berdampak pada kenaikan GDP. Kepekaan dalam perdagangan dapat dihitung dengan pertimbangan komposisi perdagangan dengan persentase GDP yang dapat diilustrasikan dengan apabila negara telah berhenti melakukan impor senilai \$1 miliar maka negara tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mengekspor sebanyak \$1 miliar juga. Oleh karena itu, kepekaan dalam perdagangan sangat berpengaruh terhadap kepekaan lainnya.

²² Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 10.

b. *Financial*

Komponen kedua dalam *sensitivity* adalah hubungan antara investasi, perbankan tradisional dan keuangan.²³ Apabila telah terjadi suatu konflik yang terjadi antar negara secara militer atau diberlakukan sanksi ekonomi yang cukup berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan militer. Sanksi ekonomi akan berdampak kepada negara lain seperti penghentian pembayaran dividen atau pemberian bunga kepada penanam modal atau investor asing serta mempengaruhi pengambilalihan aset oleh penanam modal. Hal ini akan menjadi penghambat dan mempengaruhi negara dalam pembekuan aset, akses terhadap pasar modal internasional maupun melakukan pembatasan untuk investasi asing. Penanaman modal langsung atau investasi asing secara langsung maupun portofolio dapat mempengaruhi keadaan keuangan suatu negara. Persentase investasi pada bidang industri atau manufaktur bisa berpengaruh kepada peningkatan nilai investasi jangka pendek atau jangka panjang yang berperan terhadap kenaikan GDP.

c. *Monetary*

Pada komponen ini, menjelaskan bahwa penurunan mata uang secara langsung maupun tidak langsung yang dialami suatu negara dapat dianggap sebagai dampak atau konsekuensi akibat sebuah tindakan yang diambil oleh negara tersebut.²⁴ Monetary dapat dirasakan secara langsung oleh investor asing yang terlibat dengan penanaman modal kepada negara yang terlibat perang ataupun negara yang diberikan sanksi ekonomi. Oleh karena itu, ketika negara sedang mengalami konflik dengan negara lain maka dapat menyebabkan

²³ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 10.

²⁴ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 11.

terjadinya inflasi atau penurunan nilai mata uang sedangkan apabila konflik yang terjadi dalam negeri dapat menyebabkan tidak stabilnya perekonomian dalam negeri yang menjadi penopang stabilitas nilai mata uang suatu negara.

d. *Social Demonstration* dan *Political Action*

Interdependensi juga bisa dilihat melalui komponen *sensitivity* dalam bidang tindakan sosial atau politik sama seperti yang terjadi dalam bidang perekonomian.²⁵ Terdapat sebuah efek yang bisa saja menular pada kegiatan sosial yang dianggap sebagai penyebaran yang sepele namun bisa menyebar secara luas dengan cepat. Hal ini didukung dengan perkembangan komunikasi transnasional yang telah meningkatkan *sensitivity* ini. Penyebaran komunikasi transnasional melalui TV dan media massa bisa menimbulkan kepedulian terhadap sebuah isu yang nantinya akan menyebabkan terjadinya demonstrasi atau tindakan politik.

Hubungan *asymmetrical interdependence* dengan *sensitivity* dilihat berdasarkan tingkat kepekaan yang akan berdampak kepada aktor atau negara dalam menerima sanksi yang diterima akibat hubungan interdependensi yang berjalan asimetri. Hubungan yang asimetri dapat menyebabkan negara mencari alternatif kebijakan lain dari negara ketiga dalam hubungan antar dua negara dalam meminimalisir ketergantungan yang tidak simetris. Dalam menjelaskan bentuk hubungan *asymmetrical interdependence* dapat dilihat dengan *sensitivity*. Kemudian, Robert dan Nye mengilustrasikan sebuah simulasi dengan contoh tiga negara yakni Negara A merupakan negara yang maju dan kaya sumber daya alam, Negara B merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya energi dan

²⁵ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 11.

berusaha mengembangkan perekonomiannya, sedangkan negara C merupakan produsen pengiriman energi ke negara-negara lain.²⁶

Berdasarkan ilustrasi dari ketiga negara dapat dilihat *asymmetrical interdependence* melalui *sensitivity*. Negara A memiliki tingkat *interdependence* yang lebih besar dibandingkan dengan Negara B. Meskipun Negara A memiliki sumber daya alam yang lebih banyak namun memerlukan negara lain untuk menjual sumber daya alam yang dimiliki untuk pemasukan negara. Oleh karena itu, Negara B yang tidak memiliki sumber daya alam sangat dibutuhkan bagi Negara A sebagai pembeli atau pasar bagi sumber daya alam yang dimiliki Negara A. Sedangkan Negara C sebagai produsen hanya akan memiliki hambatan dalam hal pengiriman suplai sumber daya energi dari Negara A dan Negara B. Oleh karena itu, *interdependence* yang *asymetris* akan terjalin hanya antara negara A dan B. Dalam ilustrasi ini, Negara A akan lebih membutuhkan Negara B dibandingkan Negara B membutuhkan Negara A karena Negara B bisa saja mencari Negara C untuk memenuhi kebutuhan SDA.

2. *Vulnerability*

Elemen kedua dalam melihat hubungan *asymmetrical interdependence* adalah *vulnerability*. *Vulnerability* merupakan hubungan *interdependence* yang dibebankan kepada aktor yang bertanggung jawab untuk menerima biaya yang akan diberikan baik oleh eksternal atau faktor internal yang nantinya dapat berpengaruh kepada perubahan kebijakan yang telah ada.²⁷ Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara memerlukan waktu dan tentu tidak mudah untuk

²⁶ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 12.

²⁷ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 13.

dilakukan karena mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan akibat aktor eksternal yang terlibat sebagai bagian dari kepekaan. Kemudian kerentanan dapat diukur melalui penyesuaian yang sesuai dengan lingkungan pada periode waktu tertentu.

Oleh karena itu, *vulnerability* melihat kepada kemampuan aktor dalam menyelesaikan masalah yang terjadi berdasarkan tersedianya alternatif kebijakan yang akan diambil negara. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang menyebabkan negara atau aktor tersebut menjadi interdependensi terhadap negara lain dengan cara mengurangi tingkat interdependensi dengan alternatif lain. Semakin tinggi tingkat interdependensi yang terjalin akan menghasilkan kerjasama yang hanya akan menguatkan hubungan interdependensi yang hanya akan berdampak kepada negara yang lebih lemah serta mengantisipasi agar tetap dapat mempertahankan hubungan interdependensi yang sedang berlangsung.²⁸

Asymmetrical interdependence menjelaskan *vulnerability* dengan menggambarkan pada ilustrasi tiga negara seperti pada penjelasan mengenai kepekaan.²⁹ Terdapat tiga negara yaitu Negara A dan Negara B yang memiliki kerentanan atau *vulnerability* yang dilihat berdasarkan kepada perubahan harga atau kebijakan sedangkan Negara C sebagai produsen. Negara A memiliki kemampuan dalam perkembangan teknologi akan pengolahan sumber daya alam sehingga memiliki kerentanan yang bersifat sementara dan Negara A mampu mengurangi tingkat kerentanan secara mandiri. Namun, Negara B yang tidak memiliki kemampuan dalam perkembangan teknologi untuk mengolah sumber

²⁸ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 14.

²⁹ Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power dan Interdependence*, 4th ed. (Longman Classic in Political Science, 2012), 12.

daya yang dimiliki akan memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan negara A. Dalam meminimalisir ketidakmampuan Negara B untuk menghadapi kerentanan maka Negara B akan mencari solusi alternatif dengan menjalin hubungan dengan Negara lain yang lebih dapat menguntungkan dan dapat menekan dampak yang dialami. Dalam hal ini Negara B akan menjalin kerjasama dengan Negara C sebagai produsen yang bisa menjadi solusi terbaik untuk menekan kerugian.

1.8 Metodologi Penelitian

Menurut Mohtar Mas'oe'd, Metodologi adalah prosedur penelitian yang dipakai untuk menjabarkan, menjelaskan dan meramalkan fenomena. Metode merupakan seperangkat prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi maupun data pada penelitian. Kemudian, penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban yang terencana secara sistematis dan dilakukan berdasarkan metode ilmiah.³⁰ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan metode yang menggunakan analisis interpretasi dari fenomena melalui teori.³¹ Penelitian ini akan menekankan pada fakta dan data terkait Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy*.

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan jenis penelitian yang melihat suatu isu secara holistic dan menggunakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk

³⁰Pamela Meikut dan Richard Morehous, "Beginning Qualitative Research: A Philosophic dan Practical Guide" dalam Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2016): 18-20.

³¹ Umar Suryadi Bakry, Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

memperoleh hasil yang lebih mengenai subjek yang akan dianalisis. Jenis penelitian ini dipilih karena dianggap paling relevan dalam membuktikan bahwa Korea Selatan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok pasca *Three NO's Policy*.

1.8.2 Batas Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2017-2023 untuk melihat hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy*. Permasalahan pada topik penelitian ini dimulai sejak tahun 2017 ketika Three NOs mulai diajukan oleh Korea Selatan dan disetujui oleh Tiongkok untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Selatan hingga beberapa tahun setelah adanya *Three No's Policy*. Penggunaan batas penelitian digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca *Three No's Policy*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek yang akan dianalisa dan diteliti perilakunya sebagai variabel dependen.³² Berdasarkan judul di atas objek yang akan dianalisis perilakunya adalah Hubungan Korea Selatan. Unit eksplanasi merupakan objek yang kemudian mempengaruhi perilaku unit analisis yang sedang dianalisis.³³ Unit eksplanasi pada penelitian ini adalah *Three No's Policy*. Tingkat analisa akan membantu peneliti dalam mendeskripsikan cakupan penelitian yang akan dianalisis. Tingkat analisis pada penelitian ini adalah tingkat sistem internasional.

³² Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

³³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan atau *Library Research* sebagai teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder. Peneliti memperoleh data sekunder melalui buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan surat kabar yang bisa digunakan untuk memperoleh data dan menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sedang dibahas. Dengan banyaknya bahan referensi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka peneliti kemudian melakukan pemilihan terhadap informasi yang dianggap lebih relevan dan berhubungan dengan tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan buku yang ditulis oleh Mohtar Mas'ood berjudul "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", buku karya Pamela Meikut dan Richard Morehous yang berjudul "*Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide*", buku karya Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye yang berjudul "*Power and Interdependence 4th Edition*", buku oleh Jae Ho Chung yang berjudul "*Between Ally and Partner: Korea-China Relations and the United States*", serta buku yang berjudul "*Empire and Righteous Nation*" oleh Edwin O. Reischauer. Buku-buku ini kemudian peneliti gunakan sebagai bahan referensi dalam memahami penelitian seperti konsep teori yang akan digunakan maupun metodologi penelitian.

Selain itu, peneliti juga menggunakan laporan dari *US-China Economic and Security Review Commission* yang berjudul *China's Response to US-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implication*. Laporan ini menjelaskan tentang respon yang diberikan oleh Tiongkok terhadap THAAD sebagai bentuk kerja sama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kemudian, *situs web* yang digunakan adalah artikel berita yang dipublikasikan oleh Global

Times, The Korea Times, Reuters, The Diplomat, CNBC. Data ini digunakan untuk menemukan sumber berita yang terbaru. Hal ini dikarenakan bentuk jenis data lainnya masih belum banyak membahas isu yang ingin peneliti angkat.

Kemudian, artikel jurnal yang digunakan dipublikasikan oleh The Chinese Economy, Journal of Distribution Science, Emerging Market Finance and Trade, Media Culture & Society, The Journal of The Korean Economy dan International Journal of Cultural Studies dan lainnya. Artikel-artikel ini digunakan untuk mengukur serta menjadi bahan rujukan dalam melihat ruang lingkup penelitian.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah melalui metode pengumpulan data yang berasal dari sumber yang akurat. Kemudian, data-data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi ke dalam pola-pola umum dalam sebuah kelompok data. Sehingga nantinya data-data tersebut dirumuskan lalu digeneralisasikan yang nantinya akan dapat ditarik kedalam sebuah kesimpulan akan jawaban dari pertanyaan penelitian melalui data yang telah diolah kembali oleh peneliti. Pelaksanaan penelitian ini memiliki tiga tahap untuk dapat mencapai hasil pada penelitian.

Pertama adalah reduksi data, dalam tahapan ini peneliti melakukan eliminasi atau pemilihan data yang lebih akurat dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tahapan pertama ini dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi, buku maupun *situs website* yang dicari berdasarkan kata kunci penelitian ini yakni, Korea Selatan, Tiongkok, THAAD, *Three No's Policy*, pemboikotan dalam sektor budaya, ekonomi, pariwisata dan lainnya. Kedua, penyajian data, setelah data-data tersebut

dikumpulkan maka berlanjut pada proses yang nantinya peneliti akan menyajikan data dengan cara menganalisis menggunakan konsep interdependensi oleh Robert dan Nye. Jr. Konsep ini nantinya akan menjelaskan bagaimana hubungan ketergantungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok dalam sektor ekonomi, pariwisata dan juga ekspor kebudayaan atau Hallyu pasca *Three No's Policy*. Ketiga, penarikan kesimpulan, setelah menganalisis berdasarkan konsep teori interdependensi, kemudian peneliti akan menarik sebuah kesimpulan yang nantinya akan diverifikasi berdasarkan konsep pemikiran yang digunakan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bagian ini merupakan bagian pengantar yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Pada bagian ini akan menggambarkan arah dari penelitian yang dilakukan.

BAB II Dinamika Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok

Bagian ini akan menjelaskan mengenai sejarah hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Tiongkok sejak normalisasi hubungan pada tahun 1992. Bagian ini juga akan membahas hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol. Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Moon Jae In menggambarkan awal mula permasalahan yang memperburuk hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol untuk melihat hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pada saat ini. Pada bagian ini akan membahas

hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok berdasarkan sektor perdagangan, pariwisata dan industri kebudayaan.

BAB III THAAD dan *Three No's Policy*

Pada bagian ini akan membahas mengenai THAAD yang dianggap sebagai sebuah ancaman yang dapat mengancam keamanan Tiongkok. Pada bagian ini juga akan membahas mengenai reaksi yang diberikan oleh Tiongkok terhadap keberadaan pembangunan THAAD serta reaksi publik terhadap keberadaan THAAD. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan *Three No's Policy* dalam hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok serta partisipasi baik Korea Selatan dengan Tiongkok untuk mempertahankan *Three No's Policy* yang telah disepakati.

BAB IV Analisis Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok Pasca *Three No's Policy*.

Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pasca amenggunakan kerangka konseptual Interdependensi berdasarkan buku *Power and Interdependence* oleh Robert Keohane dan Joseph S. Nye.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada sebelumnya dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian ini dengan lebih baik.

